

**PENGUATAN KESADARAN POLITIK LINGKUNGAN MASYARAKAT MELALUI
PENDEKATAN PARTICIPATORY ACTION RESEARCH DI DESA MANDALAWANGI
KABUPATEN PANDEGLANG**

**SYARKAWI¹, SISKA MARLINA², YULVIA CHRISDIANA³, NURUDDIN AR-ANIRI⁴, EGI
NADMI FALAH⁵, ADITYA NUGRAHA⁶**

Universitas Pamulang
Email: dosen03005@unpam.ac.id

Abstract: *Environmental problems are not only related to the limitations of infrastructure and facilities but also to the low level of public awareness concerning their rights, obligations, and political roles in environmental management. Communities are frequently positioned as policy objects, while their participation in planning, implementation, and supervision remains limited. This community service program aimed to strengthen environmental political awareness among the people of Mandalawangi Village, Pandeglang Regency, through an educational, participatory, and collaborative approach. The program employed Participatory Action Research (PAR), positioning the community as the main subject in problem identification, planning, action implementation, evaluation, and reflection. Activities included initial observation, coordination with village authorities, environmental political education, Focus Group Discussion (FGD), distribution of educational materials, and community-based environmental actions. The results indicated increased public understanding of rights and responsibilities in environmental management, stronger community participation in environmental activities, and improved communication between academics, village government, and local residents. The program also encouraged a paradigm shift from viewing the community as policy recipients toward recognizing them as active actors in sustainable environmental governance. Therefore, strengthening environmental political awareness through PAR can serve as an effective strategy to develop participatory, inclusive, and locally grounded environmental governance.*

Keywords: *environmental political awareness, community participation, Participatory Action Research, collaborative governance, environmental management.*

Abstrak: Permasalahan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, tetapi juga berhubungan dengan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta peran politiknya dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat sering kali ditempatkan sebagai objek kebijakan, sementara ruang partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan lingkungan masih terbatas. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran politik lingkungan masyarakat Desa Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research (PAR)*, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan tindakan, evaluasi, dan refleksi. Kegiatan dilaksanakan melalui survei awal, koordinasi dengan pemerintah desa, edukasi politik lingkungan, *Focus Group Discussion (FGD)*, penyampaian media informasi, serta aksi lingkungan berbasis masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan, tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan, serta terbentuknya komunikasi antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat. Kegiatan ini juga mendorong perubahan paradigma masyarakat dari penerima kebijakan menjadi aktor yang memiliki kapasitas untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan secara aktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan kesadaran politik lingkungan melalui PAR dapat menjadi strategi untuk membangun tata kelola lingkungan yang partisipatif, inklusif, dan berbasis kebutuhan lokal.

Kata Kunci: kesadaran politik lingkungan, partisipasi masyarakat, *Participatory Action Research*, *collaborative governance*, pengelolaan lingkungan.

A. Pendahuluan

Persoalan lingkungan merupakan masalah publik yang memiliki dimensi ekologis, sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan. Pengelolaan lingkungan tidak dapat hanya diserahkan kepada pemerintah melalui penyediaan regulasi dan fasilitas, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama. Kebijakan lingkungan akan sulit mencapai tujuan apabila masyarakat tidak memiliki pengetahuan, kesadaran, dan ruang partisipasi yang memadai. Dalam praktiknya, masyarakat masih sering diposisikan sebagai objek kebijakan. Masyarakat menerima instruksi mengenai kebersihan dan pengelolaan sampah, tetapi belum selalu dilibatkan dalam proses perumusan masalah, penyusunan solusi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan jarak antara kebijakan formal dengan praktik sosial masyarakat.

Kesadaran politik lingkungan menjadi penting karena lingkungan bukan sekadar persoalan kebersihan, melainkan juga berkaitan dengan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kesadaran politik lingkungan mencakup pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya, kemampuan menyampaikan aspirasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta kemauan melakukan tindakan kolektif untuk menjaga lingkungan.

Dalam perspektif political ecology, persoalan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan, distribusi sumber daya, kebijakan publik, dan ketimpangan akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan (Bryant & Bailey, 1997). Sementara itu, collaborative governance menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, dan aktor lainnya dalam menyelesaikan persoalan publik secara dialogis dan setara (Ansell & Gash, 2008). Desa Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diarahkan pada penguatan kesadaran politik lingkungan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui edukasi, diskusi, pemetaan persoalan, serta aksi lingkungan yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR), yaitu pendekatan yang mengintegrasikan proses pembelajaran, refleksi kritis, dan tindakan bersama. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan; (2) mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan; dan (3) memperkuat hubungan kolaboratif antara pemerintah desa, akademisi, dan masyarakat.

B. Metodologi Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sebagai objek penerima program, melainkan sebagai subjek yang terlibat dalam seluruh tahapan kegiatan. PAR dilaksanakan melalui siklus perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, dan perbaikan secara berkelanjutan. Tahapan kegiatan meliputi:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan melalui survei lokasi, observasi kondisi sosial-lingkungan, dan koordinasi dengan pemerintah Desa Mandalawangi. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman awal mengenai persoalan lingkungan, karakteristik masyarakat, potensi lokal, serta kebutuhan mitra. Tim pengabdian juga menyusun materi edukasi yang berkaitan dengan kesadaran politik lingkungan, hak dan kewajiban masyarakat, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, partisipasi publik, dan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui beberapa kegiatan berikut:

- Edukasi politik lingkungan, yaitu penyampaian materi mengenai hubungan antara kebijakan publik, lingkungan hidup, hak warga negara, dan tanggung jawab masyarakat.
- Focus Group Discussion (FGD)*, yaitu forum dialog untuk menggali pengalaman, persoalan, aspirasi, dan gagasan masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan.
- Penguatan kolaborasi, yaitu membangun komunikasi antara pemerintah desa, masyarakat, komunitas, dan akademisi.
- Aksi lingkungan, yaitu kegiatan nyata yang mendorong masyarakat untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan bersama dan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui diskusi reflektif, observasi partisipatif, dan umpan balik dari masyarakat serta pemerintah desa. Evaluasi diarahkan untuk melihat perubahan pemahaman, sikap, dan partisipasi masyarakat setelah kegiatan dilaksanakan. Indikator evaluasi meliputi: pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban lingkungan; kemampuan masyarakat mengidentifikasi persoalan lingkungan; keterlibatan masyarakat dalam kegiatan lingkungan; komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat; munculnya komitmen untuk melanjutkan kegiatan secara mandiri.

C. Hasil dan Pembahasan

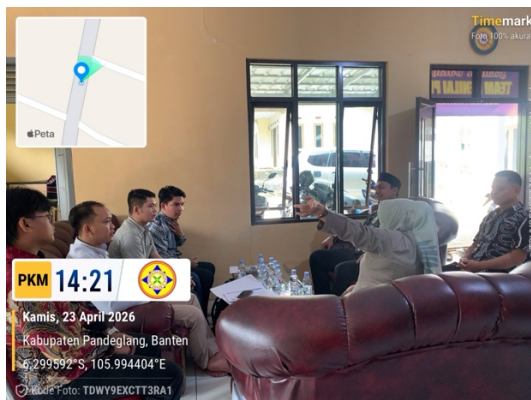
Peningkatan Pemahaman Politik Lingkungan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi politik lingkungan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami bahwa pengelolaan lingkungan bukan hanya kewajiban individual, tetapi juga tanggung jawab publik dan politik. Masyarakat didorong untuk memahami bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak warga negara yang perlu dijaga secara bersama-sama. Materi edukasi tidak hanya membahas persoalan teknis seperti kebersihan dan pemilahan sampah, tetapi juga menjelaskan hubungan antara perilaku masyarakat, kebijakan pemerintah, pelayanan publik, dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, masyarakat mulai melihat bahwa persoalan lingkungan memiliki hubungan langsung dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Pemahaman tersebut penting untuk membangun *environmental citizenship*, yaitu posisi masyarakat sebagai warga negara yang memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan kapasitas untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Kesadaran semacam ini dapat menjadi dasar bagi lahirnya partisipasi yang lebih kritis dan berkelanjutan.

FGD sebagai Ruang Dialog dan Pembelajaran Kolektif

FGD menjadi salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui FGD, masyarakat memperoleh ruang untuk menyampaikan pengalaman dan pandangan mengenai persoalan lingkungan yang dihadapi. Forum ini juga memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan antara masyarakat, pemerintah desa, dan tim akademisi. FGD tidak ditempatkan sebagai forum satu arah, melainkan sebagai ruang dialog yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik, kebutuhan, dan alternatif solusi.



Gambar 1. FGD di Desa Mandalawangi, Kab Pandeglang

Proses tersebut sejalan dengan pemikiran Freire (1970) bahwa pendidikan harus berlangsung secara dialogis dan mampu membangun kesadaran kritis masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya menerima informasi dari akademisi, tetapi juga menyampaikan pengetahuan lokal yang menjadi dasar penting dalam merumuskan solusi. Pengetahuan masyarakat mengenai kondisi lingkungan, kebiasaan sosial, serta hambatan dalam pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari proses pembelajaran bersama.

Penguatan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan pengabdian mendorong perubahan pemahaman mengenai makna partisipasi. Partisipasi tidak lagi dipahami hanya sebagai kehadiran dalam kegiatan yang diselenggarakan

pemerintah atau pihak luar, tetapi sebagai keterlibatan aktif dalam mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, melaksanakan kegiatan, dan melakukan evaluasi. Pendekatan PAR memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses tindakan. Keterlibatan tersebut dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program karena kegiatan tidak sepenuhnya dirancang secara sepihak oleh tim pengabdian. Partisipasi masyarakat juga memiliki dimensi sosial dan politik. Secara sosial, partisipasi memperkuat solidaritas dan gotong royong. Secara politik, partisipasi meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan lingkungan. Dengan demikian, partisipasi menjadi instrumen untuk memperkuat posisi masyarakat dalam tata kelola lingkungan.

Penguatan *Collaborative Governance*

Kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan perguruan tinggi. Pemerintah desa memiliki kewenangan dan sumber daya kelembagaan, masyarakat memiliki pengetahuan lokal dan modal sosial, sedangkan akademisi berperan sebagai fasilitator, edukator, dan penghubung pengetahuan. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* membutuhkan dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil antara. Unsur-unsur tersebut menjadi penting dalam pengelolaan lingkungan karena persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Dalam kegiatan di Desa Mandalawangi, kolaborasi dibangun melalui koordinasi, diskusi, penyampaian informasi, dan pelaksanaan kegiatan bersama. Proses ini memperkuat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat serta membuka peluang bagi pengembangan program lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Perubahan Paradigma Masyarakat

Salah satu hasil penting kegiatan adalah munculnya perubahan paradigma dari masyarakat sebagai objek kebijakan menjadi subjek pengelolaan lingkungan. Perubahan tersebut ditunjukkan melalui meningkatnya pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh lingkungan yang baik, sekaligus memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan. Perubahan paradigma ini tidak dapat dicapai hanya melalui penyuluhan singkat. Diperlukan proses dialog, pengalaman langsung, pendampingan, dan tindakan kolektif. Oleh karena itu, PAR relevan digunakan karena menggabungkan proses refleksi kritis dengan tindakan nyata. Masyarakat yang memiliki kesadaran politik lingkungan diharapkan mampu melakukan tindakan sederhana seperti mengurangi sampah, menjaga kebersihan, berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, menyampaikan aspirasi, dan membangun komunikasi dengan pemerintah desa. Tindakan tersebut menjadi fondasi bagi terbentuknya tata kelola lingkungan yang lebih partisipatif.

D. Penutup

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, menunjukkan bahwa penguatan kesadaran politik lingkungan dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif. Pendekatan Participatory Action Research memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses identifikasi masalah, dialog, tindakan, dan evaluasi. Kegiatan ini menghasilkan beberapa capaian utama, yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan, tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan, serta menguatnya komunikasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan akademisi. Penguatan kesadaran politik lingkungan perlu dipahami sebagai proses jangka panjang. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk melanjutkan tindakan secara mandiri dan terlibat dalam proses tata kelola lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan berkelanjutan, pelembagaan forum lingkungan, serta integrasi agenda lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan desa.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Alfabeta.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

- Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). *Third world political ecology*. Routledge.
- Dryzek, J. S. (2013). *The politics of the earth: Environmental discourses* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Fischer, F. (2003). *Reframing public policy: Discursive politics and deliberative practices*. Oxford University Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Gaventa, J. (2006). Finding the spaces for change: A power analysis. *IDS Bulletin*, 37(6), 23–33.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Koraag, R. A., Fitriani, F., Nurfaishal, M. D., Lestari, S. A. P., Permata, S., Basman, U. K., ... & Schouten, F. S. (2026). *Perencanaan Wilayah dan Kota: Konsep, Strategi, dan Implementasi Berkelanjutan*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Pretty, J. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263.
- Subarsono, A. G. (2016). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2014). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial*. Refika Aditama.
- Syarkawi, S., Kusumoningtyas, A. A., & Syaputra, J. (2026). Kebijakan Publik dalam Krisis Akuntabilitas: Studi Kasus PT Juya Aceh Mining di Kabupaten Aceh Barat Daya. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 111-120.
- Syarkawi, S., Ar-aniri, N., & Falah, E. N. (2026). Kolaborasi komunitas, pemerintah dan akademisi dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah melalui program clean up di Kota Serang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 2(8), 391-397.